



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

UNIT KERJA : ANGGOTA BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRFAN SYAKIR WIDYASA
2. Jabatan : KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
3. NHK : 788061

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.480.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah Seluas 198 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.880.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	50.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ 1,5 M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	151.678.420
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	156.202.448
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.837.880.868



III. HUTANG

Rp. 1.288.428.579

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.549.452.289

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.